

ABSTRAK

Penetapan Daerah Istimewa bagi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran memunculkan beragam respon yang bermuara pada terjadinya konflik vertikal. Konflik tersebut berakibat pada terjadinya perubahan sosial di Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi sosial dan politik Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjelang kemerdekaan tahun 1945; (2) menjelaskan gejala konflik di Surakarta tahun 1945-1950; (3) mengetahui perubahan sosial pasca pembekuan Daerah Istimewa Surakarta tahun 1946-1950. Penelitian ini menggunakan prosedur metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur, yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur baik sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) kondisi sosial di Surakarta dilihat berdasarkan stratifikasi sosial yaitu terdapat tiga tingkatan masyarakat yang terdiri atas *sentana dalem*, abdi dalem dan *kawula alit*; (2) kondisi politik di Surakarta menjelang kemerdekaan yakni meliputi a) pembagian wilayah birokrasi berdasarkan lingkaran konsentris terdiri dari (*kuthagara*, *negaragung*, *mancanegara* dan *pasisiran*), b) adanya suksesi kepemimpinan dan pergolakan *sentana dalem*, c) respon Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (bidang kemiliteran, diplomasi dan politik serta logistik), d) pemberlakuan Daerah Istimewa Surakarta; (3) terdapat Gerakan Anti Swapraja yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi seperti Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng; dan (4) terjadi perubahan sosial di Surakarta pasca konflik Anti Swapraja yaitu a) modernisasi birokrasi (Pemerintahan Karesidenan Surakarta dan Pemerintahan Darurat Militer Kota Surakarta), b) pudarnya stratifikasi sosial dan respon masyarakat, c) pengambilalihan aset milik Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, d) perubahan pola kepemilikan tanah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.

Kata Kunci: konflik; perubahan sosial; Surakarta; era revolusi.

ABSTRACT

The establishment of a Special Region for the Surakarta District and the Mangkunegaran Kadipaten gave rise to various responses which led to vertical conflict. This conflict resulted in social change in Surakarta. This research aims to (1) determine the social and political conditions of the Kasunanan of Surakarta and the Duchy of Mangkunegaran before independence in 1945; (2) explain the turmoil of conflict in Surakarta in 1945-1950; (3) knowing the social changes after the termination of the Special Region of Surakarta in 1946-1950. This research uses a historical method procedure which consists of four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Data collection in this research was carried out through literature study techniques, namely collecting data from various literature, both primary and secondary sources that are relevant to the problem being researched. Apart from that, this research also uses interviews and observations of research objects. The results of this research are (1) social conditions in Surakarta are seen based on social stratification, namely that there are three levels of society consisting of *sentana dalem*, *abdi dalem* and *kawula alit*; (2) political conditions in Surakarta before independence, including a) the division of bureaucratic areas based on concentric circles consisting of (*kuthagara*, *negaragung*, *mancanegara* and *pasisiran*), b) the existence of leadership succession and upheaval of the *sentana dalem*, c) the response of the Kasunanan of Surakarta and the Kadipaten of Mangkunegaran to the struggle to maintain Indonesian independence (military, diplomacy and politics and logistics), d) the implementation of the Special Region of Surakarta; (3) there is an *Anti-Swapraja* Movement carried out by opposition groups such as the United Struggle and *Barisan Banteng*; and (4) social changes occurred in Surakarta after the Anti-Swapraja conflict, namely a) bureaucratic modernization (Surakarta Residency Government and Surakarta City Military Emergency Government), b) fading social stratification and community response, c) takeover of assets belonging to the Surakarta District and the Mangkunegaran Duchy, d) changes in land ownership patterns of the Surakarta Kasunanan and the Mangkunegaran Duchy.

Keywords: conflict; social transformation; Surakarta; revolutionary era.